
Wacana Politik Anggota DPR dalam Merespons Solidaritas Digital: Studi atas Penggalangan Donasi Ferry Irwandi

Sheila Monica Sianturi¹, Ema Ema², Nurkinan³

^{1,2}Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kab. Karawang, Indonesia

Email: ¹sheilamonicasianturi0603@gmail.com, ²ema@fisip.unsika.ac.id, ³nurkinan@fisip.unsika.ac.id

Abstract

This study examines the discourse of a statement by a member of Commission I of the Indonesian House of Representatives from the Gerindra Party regarding digital fundraising by Ferry Irwandi in the context of flood disasters in Sumatra and Aceh. The study aims to understand how the statement constructs meaning about the roles of the state, civil society, and the digital public sphere. Using a qualitative approach with a critical paradigm, the research employs Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis. The primary data consist of excerpts from Endipat Wijaya's statement during a parliamentary working meeting, as reported by CNN Indonesia. Analysis focused on Fairclough's three dimensions: textual, discursive, and sociocultural. Findings indicate that textually, the statement uses diction that diminishes individual contributions, such as "only," "just," and "acting as if they are the most." Discursively, it was produced in an official parliamentary forum and disseminated via mass media, entering public debate. Socioculturally, the statement reflects efforts to maintain state legitimacy amid increasing civil society participation. The study concludes that political discourse can serve as an arena for contesting meaning between state narratives and citizen participation.

Keywords: *Critical Discourse Analysis, Political Discourse, Digital Fundraising*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis wacana pernyataan anggota DPR RI Komisi I Fraksi Gerindra terhadap penggalangan donasi digital yang dilakukan Ferry Irwandi dalam konteks bencana banjir di Sumatera dan Aceh. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana pernyataan tersebut membangun makna mengenai peran negara, partisipasi masyarakat sipil, dan dinamika ruang publik digital. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan paradigma kritis menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Data primer berupa kutipan pernyataan Endipat Wijaya dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi Digital yang diberitakan oleh CNN Indonesia. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi Fairclough, yaitu tekstual, praktik diskursif, dan sosiokultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks menggunakan diksi yang mereduksi kontribusi masyarakat sipil, wacana diproduksi dalam forum resmi DPR dan disebarluaskan melalui media daring, serta mencerminkan upaya negara mempertahankan legitimasi di tengah meningkatnya partisipasi warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana politik dapat menjadi arena perebutan makna antara narasi negara dan partisipasi masyarakat sipil.

Kata kunci: *Analisis Wacana Kritis, Wacana Politik, Donasi Digital*

PENDAHULUAN

Ruang publik dalam sistem demokrasi menjadi arena penting bagi aktor politik untuk menyampaikan sikap, kritik, dan penilaian terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, pernyataan pejabat publik tidak hanya dapat dipahami sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai praktik simbolik yang berpotensi membentuk persepsi khalayak. Bahasa yang digunakan dalam forum resmi seperti rapat kerja DPR dapat memuat kepentingan, posisi ideologis, serta relasi kuasa tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Dijk (1997) bahwa wacana politik berperan dalam menciptakan realitas sosial melalui penggunaan bahasa yang berkaitan dengan kekuasaan dan ideologi.

Kemajuan media digital telah memperluas ruang diskusi antara negara, media, dan masyarakat. Dalam situasi kebencanaan, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai ruang mobilisasi solidaritas publik. Salah satu wujud dari mobilisasi ini adalah pengumpulan donasi secara digital yang dilakukan oleh individu maupun komunitas melalui *platform online*. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk membangun respons sosial secara cepat, luas, dan partisipatif. Melalui media sosial, pesan solidaritas dapat tersebar secara luas dan memotivasi partisipasi publik dalam berbagai aksi sosial, termasuk penggalangan dana secara digital (Priselie & Paramita, 2022). Selain itu, ruang digital juga dapat dipahami sebagai ruang partisipasi warga dalam membangun tindakan kolektif di luar institusi formal negara (Kristianto, 2021).

Fenomena ini terlihat pada penggalangan donasi digital yang diinisiasi oleh Ferry Irwandi dalam merespons bencana banjir di Sumatera dan Aceh. Melalui pemanfaatan media sosial Instagram dan platform donasi *online*, upaya tersebut berhasil menarik perhatian luas dari publik dan mengumpulkan dana dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan ini menegaskan bahwa ruang digital dapat menjadi alat yang efektif bagi masyarakat sipil untuk membangun solidaritas dan mengoordinasikan bantuan secara cepat. Dalam hal ini, media digital tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang memproduksi, menyebarkan, serta menggerakkan respons sosial terhadap suatu peristiwa (Nasrullah, 2015).

Di sisi lain, besarnya perhatian publik terhadap aksi tersebut turut menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara negara dan masyarakat, khususnya ketika partisipasi warga tampak lebih dominan daripada narasi kehadiran negara. Situasi ini sejalan dengan pemikiran (Habermas, 1991) yang menyatakan bahwa ruang publik memungkinkan warga negara membangun diskursus, menyampaikan opini, dan turut serta dalam membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Dinamika semacam ini kemudian memunculkan respons dari aktor politik negara, seperti melalui pernyataan anggota DPR RI Komisi I Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, dalam rapat kerja bersama Menteri Komunikasi Digital. Dalam perspektif komunikasi politik, pernyataan pejabat publik dapat diartikan sebagai praktik komunikasi yang mencerminkan posisi, kepentingan, dan representasi tertentu terhadap isu yang berkembang di tengah masyarakat (Van Dijk, 1997).

Dalam pernyataannya, Endipat Wijaya menyoroti narasi publik yang dianggap menggambarkan negara tidak hadir dalam penanganan bencana. Ia membandingkan donasi masyarakat yang disebut “cuma” Rp10 miliar dengan anggaran negara yang disebut telah mencapai “triliun-triliunan”. Pernyataan tersebut kemudian diberitakan oleh sejumlah media daring nasional dan memicu pembahasan publik. Dalam konteks ini, bahasa yang digunakan oleh anggota DPR menjadi penting untuk dikaji karena dapat merepresentasikan cara institusi negara merespons partisipasi masyarakat sipil di ruang digital. Menurut (Eriyanto, 2001), bahasa dalam wacana tidak bersifat netral, melainkan

dapat menjadi sarana untuk membentuk makna, menegaskan posisi tertentu, dan merepresentasikan relasi kekuasaan.

Penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough untuk membongkar konstruksi makna dalam pernyataan tersebut. Fairclough memandang wacana sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan teks, proses produksi dan konsumsi teks, serta struktur sosial yang melingkupinya (Fairclough, 1992). Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memeriksa pilihan kata dalam pernyataan Endipat Wijaya, tetapi juga melihat bagaimana pernyataan tersebut diproduksi dalam forum politik, disebarkan media, dan dimaknai dalam konteks sosial-politik yang lebih luas. Model tiga dimensi Fairclough mencakup analisis tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural yang memungkinkan peneliti memahami hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan praktik sosial (Fairclough, 1995).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough efektif untuk menganalisis relasi bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam komunikasi politik. Studi oleh Rahayu (2024) meneliti pernyataan penutup Anies Baswedan pada Final Debat Pilpres 2024. Hasilnya menunjukkan pidato sarat ideologi class-struggle, menyoroti ketimpangan kelas menengah-bawah, perlakuan tidak adil terhadap kelompok rentan, dan janji peningkatan kualitas hidup generasi penerus. Selain itu, Penelitian Firdaus (2025) terhadap pernyataan Dedi Mulyadi mengenai penghapusan wisuda sekolah menunjukkan bahwa pernyataan politik membentuk wacana tandingan terhadap praktik sosial dominan, menekankan posisi kuasa aktor, dan memengaruhi persepsi publik melalui media daring. Sementara itu, Sitorus et al. (2025) menganalisis pidato Megawati Soekarnoputri dan menemukan bahwa pidato tersebut mereproduksi ideologi, membangun citra moral dan nasionalis, serta menegaskan legitimasi politik melalui strategi retorik dan diksi yang dipilih, sementara distribusi melalui media daring memungkinkan publik menafsirkan dan memperdebatkan pesan politik.

Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa pemetaan konstruksi wacana politik yang tidak hanya dipahami sebagai respons formal DPR, tetapi juga sebagai praktik sosial-politik yang menegosiasikan posisi negara, partisipasi masyarakat sipil, dan legitimasi di ruang publik digital. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menghadirkan analisis kritis terhadap pernyataan anggota DPR terkait penggalangan donasi digital, sebuah fenomena yang sebelumnya belum banyak dikaji dalam konteks komunikasi politik dan kebencanaan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperluas kajian komunikasi politik digital, wacana kebencanaan, serta partisipasi masyarakat sipil, sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, media, dan aktor publik dalam menyampaikan pernyataan politik secara strategis dan responsif terhadap dinamika ruang publik digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi wacana dalam pernyataan anggota DPR RI Komisi I Fraksi Gerindra terkait penggalangan donasi digital Ferry Irwandi melalui tiga dimensi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, yaitu dimensi tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough menekankan bahwa bahasa adalah praktik sosial yang membentuk, mempertahankan, dan menantang relasi kuasa serta ideologi dalam masyarakat. Wacana politik tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi untuk membingkai isu publik, menegaskan legitimasi aktor politik, dan mempengaruhi persepsi masyarakat. AWK Fairclough membagi analisis menjadi tiga

dimensi utama: dimensi tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural (Fairclough, 1995).

Dimensi tekstual menelaah unsur kebahasaan, termasuk diksi, struktur kalimat, metafora, dan strategi retorik yang digunakan aktor politik untuk membangun makna tertentu. Dimensi praktik diskursif menekankan proses produksi, distribusi, dan konsumsi wacana, termasuk bagaimana teks politik diproduksi di forum resmi, disebarkan melalui media, dan ditafsirkan oleh publik. Sedangkan dimensi praktik sosiokultural mengaitkan wacana dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang lebih luas, termasuk struktur kekuasaan dan ideologi yang membentuk serta dibentuk oleh wacana tersebut (Frima & Lubis, 2024).

Dalam penelitian ini, kerangka AWK Fairclough digunakan untuk menganalisis pernyataan DPR RI terkait penggalangan donasi digital Ferry Irwandi. Analisis pada ketiga dimensi memungkinkan peneliti memahami bagaimana bahasa DPR digunakan untuk menegaskan legitimasi negara, merespons partisipasi masyarakat sipil, dan membentuk persepsi publik di ruang publik digital, sehingga wacana politik dipahami bukan sekadar teks, tetapi praktik sosial yang terkait erat dengan kekuasaan dan interaksi publik.

Wacana Politik

Wacana politik merupakan bentuk komunikasi yang digunakan oleh aktor politik untuk menyampaikan pesan, membentuk opini publik, serta menegosiasikan hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. *Political discourse* tidak hanya mencakup pidato formal dan debat, tetapi juga teks dan pembicaraan yang dihasilkan dalam forum legislatif, kampanye, atau media massa yang berfungsi memengaruhi proses pengambilan keputusan dan persepsi publik. Penelitian lain menyatakan bahwa wacana politik berperan sebagai ekspresi praktik budaya politik yang mencerminkan struktur kekuasaan dan nilai ideologis tertentu (Bekturovna, 2024). Dalam praktiknya, wacana politik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai isu publik, membentuk opini masyarakat, dan menegaskan posisi ideologi dan legitimasi institusi. Menurut analisis komunikasi politik yang dilakukan dalam konteks konflik dan transisi politik, wacana juga berperan untuk membentuk citra publik dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keputusan politik dan kebijakan pemerintah (Andini et al., 2024). Penelitian ini memanfaatkan konsep wacana politik untuk menelaah bagaimana DPR membangun narasi resmi terkait penggalangan donasi digital, menegaskan posisi negara, dan merespons partisipasi masyarakat di ruang publik digital.

Selain itu, wacana politik kini semakin dipengaruhi oleh media digital. Strategi komunikasi politik melalui media daring memungkinkan aktor legislatif berinteraksi secara langsung dengan publik, membangun relasi, dan memicu partisipasi masyarakat. Penggunaan bahasa, diksi, dan struktur retorik menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi serta mengontrol narasi publik (Dwitama et al., 2022). Dalam penelitian ini, wacana politik DPR di media digital dianalisis untuk memahami bagaimana pesan legislatif dikonstruksi dan diterima oleh publik dalam konteks penggalangan donasi digital.

Wacana politik juga berfungsi sebagai arena kontestasi makna, di mana narasi negara dan masyarakat sipil saling berinteraksi. Publik dapat menafsirkan, menanggapi, dan memperdebatkan pesan politik yang disampaikan legislatif, sehingga interaksi ini membentuk persepsi publik tentang peran dan legitimasi negara (Hasibuan et al., 2024). Penelitian ini memanfaatkan perspektif ini untuk menganalisis bagaimana DPR menggunakan wacana politik untuk menegaskan legitimasi dan menanggapi partisipasi warga melalui donasi digital, sekaligus menempatkan ruang publik digital sebagai arena interaksi antara negara dan masyarakat sipil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menjelaskan konstruksi makna yang terdapat dalam pernyataan anggota DPR RI Komisi I Fraksi Gerindra terkait penggalangan donasi digital yang dilakukan oleh Ferry Irwandi pada peristiwa banjir di Aceh dan Sumatera. Penelitian ini berfokus pada bagaimana bahasa yang digunakan dalam pernyataan tersebut membentuk persepsi publik serta menunjukkan posisi dan legitimasi negara dalam menangani bencana (Sugiyono, 2013).

Data utama penelitian diperoleh dari kutipan pernyataan Endipat Wijaya yang dimuat dalam berita CNN Indonesia pada 9 Desember 2025. CNN Indonesia dipilih sebagai sumber data karena merupakan media daring nasional yang memiliki kredibilitas dan standar editorial yang baik. Selain itu, pada saat peristiwa tersebut terjadi, CNN Indonesia menjadi media yang memuat pernyataan Endipat Wijaya secara lengkap dan verbatim. Oleh karena itu, sumber ini dinilai paling relevan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, menyalin, dan menyimpan teks pernyataan yang menjadi objek penelitian. Peneliti juga melakukan studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, komunikasi politik, serta penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat landasan teori dan analisis penelitian (Creswell, 1994).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang terdapat dalam pemberitaan CNN Indonesia dengan pemberitaan dari media lain yang membahas isu yang sama. Langkah ini bertujuan untuk melihat konsistensi informasi dan meminimalkan kemungkinan bias dalam interpretasi data. Selain itu, peneliti juga menelusuri berbagai sumber publik, seperti situs resmi DPR RI dan arsip berita daring, guna memastikan bahwa kutipan yang dianalisis benar-benar berasal dari pernyataan Endipat Wijaya yang autentik (Creswell, 2014).

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu dimensi tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana aktor, relasi kekuasaan, dan identitas direpresentasikan dalam teks, sekaligus memahami proses produksi, distribusi, dan konsumsi wacana dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Tahap analisis dimulai dengan mengidentifikasi bagian-bagian teks yang relevan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tiga dimensi Fairclough, dan diakhiri dengan menafsirkan makna sosial serta ideologi yang terkandung dalam pernyataan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan temuan penelitian dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Peneliti akan mengulas bagaimana pernyataan Endipat Wijaya bekerja secara tekstual, bagaimana proses produksinya secara diskursif, hingga faktor sosiokultural apa yang melatarbelakangi munculnya pernyataan tersebut.

Analisis Dimensi Tekstual

Analisis teks merupakan dimensi pertama dalam model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang berfokus pada kajian terhadap unsur-unsur linguistik dalam suatu wacana. Pada dimensi ini, analisis dilakukan terhadap pilihan kata, penggunaan kalimat, gaya bahasa, serta struktur teks yang digunakan oleh aktor dalam menyampaikan pesan.

Pernyataan 1:

"Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana."

Pernyataan Endipat Wijaya menunjukkan penggunaan pilihan kata yang bersifat kontras dan merendahkan pihak tertentu. Frasa *"cuma datang sekali"* digunakan untuk mengecilkan kontribusi pihak tertentu yang terlibat dalam penanganan bencana. Kata *"cuma"* mengandung makna pembatasan yang menempatkan tindakan pihak tersebut sebagai sesuatu yang tidak signifikan. Sementara itu, frasa *"paling bekerja"* digunakan secara sarkastik untuk menggambarkan pihak yang dianggap terlalu menonjolkan perannya.

Di sisi

lain, penggunaan kata *"negara udah hadir dari awal"* membangun citra positif pemerintah sebagai aktor utama dalam penanganan bencana. Frasa ini berfungsi sebagai legitimasi terhadap peran negara sekaligus membantah narasi bahwa pemerintah tidak bekerja. Kalimat *"pemerintah udah bikin ratusan posko"* memperkuat legitimasi tersebut melalui penyebutan kuantitas yang menunjukkan besarnya keterlibatan pemerintah.

Dari segi struktur kalimat, pernyataan ini menggunakan pola perbandingan dan pertentangan yang ditandai dengan kata *"padahal"*. Pengulangan kata tersebut berfungsi untuk memperkuat oposisi antara pihak yang dikritik dengan pemerintah, sehingga audiens diarahkan untuk memandang negara sebagai pihak yang lebih berkontribusi.

Pernyataan 2

"Jadi yang kira-kira seperti itu Bu. Mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat."

Pernyataan ini memperlihatkan upaya Endipat Wijaya dalam membangun legitimasi terhadap kinerja pemerintah melalui media komunikasi publik. Kata *"atensi"* menunjukkan adanya permintaan khusus kepada Komdigi agar memberikan perhatian lebih pada penyebaran informasi pemerintah. Sementara itu, frasa *"memang sudah hebat"* merupakan bentuk evaluasi positif yang secara eksplisit memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah.

Pilihan kata *"publik itu tahu"* menunjukkan bahwa pembicara menganggap terdapat kesenjangan informasi antara kinerja pemerintah dan pengetahuan masyarakat. Dengan demikian, persoalan utama yang dibangun bukan pada kinerja pemerintah, melainkan pada kurangnya penyebaran informasi mengenai kinerja tersebut.

Struktur kalimat yang digunakan berbentuk ajakan dan rekomendasi. Penggunaan kata *"mohon"* memberikan kesan santun, tetapi tetap menunjukkan arahan kepada Komdigi untuk menjalankan fungsi komunikasi yang mendukung citra pemerintah.

Pernyataan 3

"Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana."

Pernyataan ini menunjukkan penggunaan strategi perbandingan kuantitatif untuk menegaskan superioritas peran negara. Kata *"cuma"* digunakan untuk mereduksi nilai bantuan pihak lain, sedangkan frasa *"triliun-triliunan"* digunakan untuk memperbesar kontribusi pemerintah. Kontras ini membangun relasi hierarkis antara negara dan aktor non-negara dalam penanganan bencana.

Frasa *"negara tidak hadir"* dimunculkan sebagai narasi yang ingin dibantah. Dengan menyatakan bahwa *"negara sudah hadir sejak awal"*, Endipat berupaya memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus menolak kritik yang berkembang di ruang publik.

Pernyataan 4

"Saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu."

Pernyataan ini menggunakan pilihan kata yang bersifat persuasif dan kooperatif. Frasa *"memberikan masukan"* menunjukkan posisi pembicara sebagai pihak yang menawarkan saran, bukan instruksi langsung. Namun, penggunaan kata *"mengamplifikasi"* menunjukkan adanya dorongan agar Komdigi lebih aktif menyebarkan informasi yang menguntungkan pemerintah.

Istilah *"informasi-informasi strategis"* memiliki makna ideologis karena tidak merujuk pada semua informasi, melainkan informasi tertentu yang dianggap penting untuk membangun citra positif pemerintah. Dengan demikian, terdapat upaya untuk mengarahkan fokus komunikasi publik pada aspek-aspek yang mendukung legitimasi pemerintah.

Pernyataan 5

"Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macam lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal."

Pernyataan ini menunjukkan pembelaan terhadap institusi pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan. Frasa *"secara besar-besaran"* digunakan untuk menekankan skala program yang dilakukan. Sementara itu, kata *"dikuliti"* merupakan metafora yang menggambarkan kritik publik secara berlebihan terhadap Kementerian Kehutanan.

Penggunaan frasa *"tidak pernah sampai ke telinga"* menunjukkan adanya asumsi bahwa masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai kinerja pemerintah. Dengan demikian, kritik yang muncul diposisikan sebagai akibat dari kurangnya penyebaran informasi, bukan karena ketiadaan kinerja.

Pernyataan 6

"Sebagai contohnya lagi teman-teman polisi dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk apa, perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif."

Pernyataan ini memperluas pembelaan terhadap institusi negara dengan memasukkan aparat kepolisian sebagai aktor yang berkontribusi dalam penanganan persoalan lingkungan. Frasa *"dari awal"* kembali digunakan untuk menegaskan konsistensi dan kehadiran negara sejak awal proses penanganan masalah.

Sementara itu, frasa *"tidak pernah juga terdengar secara masif"* menunjukkan bahwa persoalan utama menurut pembicara bukan pada tindakan pemerintah, melainkan pada minimnya eksposur publik terhadap tindakan tersebut.

Penggunaan kata *"lagi"* menunjukkan bahwa pernyataan ini berfungsi memperkuat klaim bahwa banyak kinerja pemerintah yang tidak diketahui masyarakat.

Pernyataan 7

"Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi"

informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu."

Pernyataan ini menunjukkan upaya mendorong Komdigi agar lebih aktif dalam membentuk opini publik. Kata "*mengamplifikasi*" kembali digunakan untuk menekankan pentingnya penyebaran informasi yang mendukung pemerintah. Frasa "*nggak kalah viral*" menunjukkan bahwa logika komunikasi yang digunakan berorientasi pada daya sebar dan popularitas informasi di media digital.

Sementara itu, frasa "*sok paling-paling*" merupakan bentuk delegitimasi terhadap pihak lain yang dianggap terlalu menonjolkan kontribusinya dalam penanganan bencana. Pilihan kata ini memiliki konotasi negatif dan berfungsi membangun citra bahwa pihak tersebut tidak layak memperoleh perhatian lebih dibanding pemerintah.

Analisis Praktik Diskursif

Praktik diskursif dalam model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough berfokus pada bagaimana suatu teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Analisis ini tidak hanya melihat isi teks, tetapi juga proses yang melatarbelakangi kemunculan teks tersebut serta bagaimana audiens menerima dan memaknai pesan yang disampaikan.

Produksi Teks

Produksi teks merujuk pada proses bagaimana suatu wacana dibentuk dan dipublikasikan oleh media. Teks yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari berita CNN Indonesia berjudul "Anggota DPR Sindir Donasi Banjir Warga Cuma Rp10 M: Sok Paling-paling" yang dipublikasikan pada 9 Desember 2025. Berita tersebut memuat pernyataan Endipat Wijaya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital. Dalam proses produksi teks, CNN Indonesia berperan sebagai institusi media yang memilih, menyusun, dan mengemas informasi tertentu menjadi sebuah berita. Judul berita menonjolkan pernyataan "sindir donasi banjir warga cuma Rp10 miliar" dan "sok paling-paling" yang merupakan bagian paling kontroversial dari pernyataan Endipat Wijaya. Pemilihan judul tersebut menunjukkan adanya proses seleksi informasi yang bertujuan menarik perhatian publik sekaligus menekankan aspek konflik dalam pernyataan narasumber.

Selain itu, CNN Indonesia menyusun berita dengan mengutip langsung pernyataan Endipat Wijaya sehingga pembaca dapat memahami konteks argumen yang disampaikan. Namun demikian, melalui pemilihan kutipan tertentu dan penempatan informasi dalam teks berita, media turut membentuk fokus perhatian audiens terhadap isu yang dibahas.

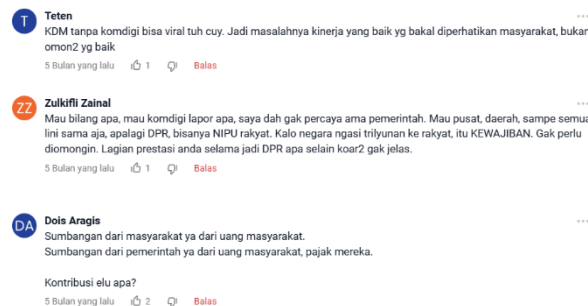
Distribusi Teks

Distribusi teks berkaitan dengan bagaimana teks disebarluaskan kepada khalayak. Berita mengenai pernyataan Endipat Wijaya dipublikasikan melalui portal berita daring CNN Indonesia yang dapat diakses secara luas melalui internet. Sebagai media online, CNN Indonesia memungkinkan penyebaran informasi berlangsung cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan media konvensional.

Karakteristik media daring juga memungkinkan berita untuk dibagikan ulang melalui berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, maupun situs berita lainnya. Dengan demikian, pernyataan Endipat Wijaya tidak hanya dikonsumsi oleh pembaca CNN Indonesia, tetapi juga berpotensi direproduksi dan didiskusikan di berbagai ruang digital.

Selain itu, keberadaan fitur komentar pada portal berita daring menunjukkan bahwa distribusi teks tidak lagi bersifat satu arah. Audiens dapat berpartisipasi secara langsung dengan memberikan tanggapan, kritik, maupun opini terhadap isi berita. Hal ini menunjukkan bahwa media digital menyediakan ruang interaksi antara teks dan pembaca dalam proses penyebaran wacana.

Konsumsi Teks



Gambar 1 Tangkapan Layar Kolom Komentar

Konsumsi teks merujuk pada bagaimana audiens menerima, menafsirkan, dan memberikan respons terhadap suatu wacana. Berdasarkan kolom komentar pada berita CNN Indonesia, terlihat bahwa mayoritas pembaca memberikan respons kritis terhadap pernyataan Endipat Wijaya.

Komentar dari akun "Zulkifli Zainal" menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ia menyatakan bahwa bantuan negara kepada masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sehingga tidak perlu digunakan sebagai bahan perbandingan dengan donasi masyarakat. Komentar tersebut menunjukkan adanya pembacaan opositional reading, yaitu audiens menolak makna yang berusaha dibangun dalam pernyataan Endipat Wijaya.

Komentar lain dari akun "Dois Aragis" juga menunjukkan penolakan terhadap argumen yang disampaikan. Melalui pernyataan bahwa sumber dana pemerintah berasal dari pajak masyarakat, pembaca mengonstruksi pemahaman bahwa bantuan pemerintah dan bantuan masyarakat tidak dapat diposisikan secara hierarkis. Respons ini menunjukkan adanya interpretasi alternatif yang berbeda dari narasi yang dibangun oleh narasumber.

Sementara itu, beberapa komentar seperti yang disampaikan akun "Teten" menunjukkan penerimaan parsial terhadap pesan yang disampaikan Endipat Wijaya. Komentar tersebut menilai bahwa permasalahan utama terletak pada kurangnya publikasi terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya pembaca yang menerima sebagian pesan dalam teks, meskipun tetap memberikan interpretasi sendiri terhadap isu yang dibahas.

Berdasarkan respons yang muncul, dapat disimpulkan bahwa konsumsi teks tidak berlangsung secara pasif. Pembaca secara aktif menafsirkan, menerima, maupun menolak makna yang terkandung dalam pernyataan Endipat Wijaya. Hal ini menunjukkan bahwa proses konsumsi teks dalam media digital menghasilkan berbagai bentuk pemaknaan yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan posisi ideologis masing-masing pembaca.

Analisis Praktik Sosiokultural

Pada level situasional, pernyataan Endipat Wijaya disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital pada 9 Desember 2025. Menariknya, agenda utama rapat tersebut sebenarnya membahas isu disinformasi dan ketahanan digital, bukan penanganan bencana. Namun, Endipat Wijaya justru menyinggung

penggalangan donasi yang dilakukan Ferry Irwandi serta peran negara dalam penanganan banjir di Aceh dan Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut dianggap penting untuk dibahas dalam forum resmi karena telah menjadi perhatian publik yang luas. Kondisi ini juga memperlihatkan adanya dorongan bagi aktor politik untuk merespons fenomena sosial yang berkembang di ruang digit

Pada level institusional, pernyataan tersebut diproduksi dan disebarkan melalui dua institusi utama, yaitu DPR RI dan CNN Indonesia. Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi dan informasi, Endipat Wijaya memiliki posisi yang memberinya legitimasi untuk berbicara mengenai komunikasi publik dan penyebaran informasi pemerintah. Sementara itu, CNN Indonesia berperan dalam menyampaikan pernyataan tersebut kepada khalayak melalui pemberitaan. Dalam prosesnya, media tidak hanya berfungsi sebagai penyalur informasi, tetapi juga ikut membentuk makna melalui pemilihan sudut pandang dan penggunaan judul berita. Penggunaan frasa seperti “sindir” dan “sok paling-paling” menunjukkan bagaimana media membingkai pernyataan tersebut sehingga memiliki makna tertentu bagi pembaca.

Pada level sosial, pernyataan Endipat Wijaya dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan hubungan antara negara dan masyarakat dalam ruang publik digital. Keberhasilan Ferry Irwandi mengumpulkan donasi dalam jumlah besar melalui media sosial menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki kemampuan yang semakin besar untuk melakukan aksi kolektif tanpa bergantung sepenuhnya pada negara. Situasi ini secara tidak langsung menantang pandangan bahwa negara merupakan aktor utama yang selalu hadir dalam penanganan bencana. Dalam perspektif Fairclough (1992), kelompok yang memiliki posisi dominan sering kali menggunakan wacana untuk mempertahankan legitimasi dan pengaruhnya. Hal tersebut terlihat dari cara Endipat Wijaya menekankan besarnya bantuan negara, membandingkannya dengan donasi masyarakat, serta mendorong pemerintah untuk lebih aktif menyebarkan narasi kinerjanya di ruang digital. Secara keseluruhan, analisis pada ketiga level sosiokultural menunjukkan bahwa pernyataan Endipat Wijaya tidak dapat dipahami hanya sebagai komentar pribadi, tetapi sebagai bagian dari praktik sosial yang lebih luas. Wacana tersebut diproduksi dalam forum resmi, disebarkan melalui media nasional, dan kemudian dikonsumsi serta diperdebatkan oleh publik di ruang digital. Fenomena ini mencerminkan adanya kontestasi legitimasi antara negara dan masyarakat sipil dalam membangun narasi mengenai penanganan bencana. Dalam konteks perkembangan media digital di Indonesia, dinamika tersebut menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana bahasa politik digunakan untuk mempertahankan otoritas dan memengaruhi persepsi publik.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana yang terkandung dalam pernyataan Endipat Wijaya terkait penanganan bencana di Sumatra melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Berdasarkan hasil analisis pada dimensi teks, ditemukan bahwa Endipat Wijaya menggunakan pilihan kata yang menonjolkan peran negara sekaligus mereduksi kontribusi pihak lain. Penggunaan kata dan frasa seperti “negara sudah hadir”, “triliun-triliunan”, serta “sok paling-paling” menunjukkan adanya upaya membangun legitimasi terhadap pemerintah dan membentuk citra positif mengenai kinerja negara dalam penanganan bencana.

Pada dimensi praktik diskursif, proses produksi teks dilakukan oleh CNN Indonesia melalui pemilihan dan penyusunan informasi yang menonjolkan aspek kontroversial dari pernyataan Endipat Wijaya. Distribusi teks berlangsung melalui media daring yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat.

Sementara itu, konsumsi teks menunjukkan adanya beragam respons dari pembaca yang mengkritik pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa audiens tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif menafsirkan dan membangun makna berdasarkan sudut pandang masing-masing.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun realitas sosial, mempertahankan legitimasi kekuasaan, serta memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami hubungan antara bahasa, media, dan kekuasaan dalam ruang publik digital.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan menganalisis dimensi praktik sosiokultural secara lebih mendalam sehingga dapat mengungkap faktor-faktor sosial, politik, dan ideologis yang melatarbelakangi munculnya wacana tersebut. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat menggunakan sumber data yang lebih beragam, seperti pemberitaan dari berbagai media atau respons masyarakat di media sosial, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi dan penerimaan wacana di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, S. P., Andarini, C., Anwari, F. R., Egaikmal, N. K., & Hikmawan, R. (2024). *TALIBAN 2.0: TRANSISI PENDEKATAN KOMUNIKASI POLITIK TALIBAN DALAM MEMBANGUN CITRA DEMOKRASI*. 4(4), 525–543.
- Bekturovna, C. N. (2024). *POLITICAL DISCOURSE AND ITS ROLE IN SHAPING PUBLIC OPINION*. 277–290.
- Creswell, J. W. (n. d. . (1994). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., & Gunanto, D. (2022). *MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA 2020 TANGERANG SELATAN*. 3(1).
<https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: pengantar analisis teks media*. LKiS Yogyakarta, 2001.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*.
- Firdaus, Y. A. (2025). ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP PERNYATAAN DEDI MULYADI TENTANG PENGHAPUSAN WISUDA SEKOLAH: PERSPEKTIF NORMAN FAIRCLOUGH. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 05(04), 378–388.
<https://doi.org/https://doi.org/10.69957/relasi.v5i04.2276>
- Frima, M. S., & Lubis, F. O. (2024). *Kritik Pemerintah Pada Lagu “ Gugatan Rakyat Semester ” Karya Feast ; Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough*. 5(2), 230–242.

- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT PRESS.
- Hasibuan, N. E., Sidabalok, U. F., Afandi, R., & Manurung, M. (2024). *PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP ELEKTABILITAS BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN*. 6(1), 14–21.
- Kristianto. (2021). Media Sosial dan Connective Action : Studi Kasus Penggunaan Twitter sebagai Ruang Solidaritas selama Pandemi COVID-19. *Journal of Social Development Studies*, 2(1), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsds.1037>.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Priselie, A. E., & Paramita, S. (2022). *Strategi Komunikasi Digital Influencer dalam Menggunakan Media Sosial Instagram sebagai Media Fundraising*. 163–170.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pr.v6i1.10375>
- Rahayu, S. (2024). *Ideologi Class-Struggle dalam Pernyataan Penutup Anies Baswedan pada Debat Final Pemilu Presiden 2024 : Kajian Analisis Wacana Kritis Fairclough*. 5(6), 3103–3112.
- Sitorus, R. Y., Any, R., Tarigan, B., Nahampun, D. Y., Bahasa, P., Bahasa, F., & Medan, U. N. (2025). *Praktik Kekuasaan : Studi Analisis Wacana Terhadap Pidato Megawati Soekarno Putri*. 1(4), 765–775.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Van Dijk. (1997). *Discourse as Social Interaction (Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, Volume 2)*. Sage Publications.